



Media: Republika

Hari: Kamis

Tanggal: 04 Februari 2021

Halaman: 8

Lima Puluh Hotel Berhenti Operasi

Pergerakan uang masuk dan keluar hotel-hotel tersebut tidak seimbang.

■ SILVY DIAN SETIAWAN

YOGYAKARTA — Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY menyebut sudah ada 50 hotel yang terpaksa berhenti beroperasi selama diterapkannya pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat (PTKM). Total, hotel dan resto di bawah naungan PHRI DIY lebih dari 400 hotel dan resto.

Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono mengatakan, periode pertama diterapkannya PTKM pada 11-25 Januari 2021, ada 30 hotel dan resto yang berhenti beroperasi.

Sedangkan, 20 hotel dan resto lainnya berhenti beroperasi pada periode kedua saat perpanjangan PTKM di DIY sejak 26 Januari lalu. "Total 50 hotel dan resto (berhenti beroperasi) yang tapi kebanyakan hotel non bintang dan resto kecil," kata Deddy saat dikonfirmasi *Republika* melalui pesan tertulis, Rabu (3/2).

Deddy menyebut, hotel dan resto yang berhenti beroperasi ini disebabkan karena pergerakan uang masuk dan keluar (*cash flow*) tidak se-

imbang. Pasalnya, pendapatan hotel dan resto di DIY berkurang selama pandemi Covid-19, ditambah PTKM. Sementara, pengeluaran yang harus dikeluarkan tetap besar. Sehingga, biaya operasi hotel dan resto ini kadang menjadi minus akibat besarnya pengeluaran dari pada pendapatan.

"Mereka sudah tidak kuat lagi dengan *cash flow*-nya, karena argo seperti bayar PLN, BPJS, pajak-pajak, gaji dan lain-lain. Tetap jalan (beroperasi) sementara pemasukan sedikit bahkan *zonk* (not-Red)," ujarnya.

Deddy menuturkan, hotel dan resto di DIY hidup karena ada pergerakan manusia. Namun, di tengah pandemi dan PTKM ini pergerakan manusia dibatasi. Terlebih, DIY mengandalkan industri pariwisata untuk meningkatkan perekonomiannya. Deddy menjelaskan, dari 400 lebih hotel dan resto, hanya 171 hotel dan resto yang saat ini masih beroperasi.

Walaupun begitu, kondisi hotel dan resto yang beroperasi ini sudah sangat kepayahan. Sedangkan, hotel dan resto lainnya memilih untuk tidak beroperasi baik itu secara permanen maupun sementara.

Deddy bahkan mengklaim ada hotel yang terpaksa dijual. "Memang ada (hotel yang dijual)," kata Deddy.

Walaupun begitu, pihaknya belum menerima informasi secara resmi terkait beberapa hotel yang sudah dijual oleh pengelola. Sehingga, ia belum mengetahui ada berapa hotel di DIY yang sudah dijual.

Untuk itu, pihaknya membutuhkan relaksasi dari pemerintah. Sehingga, industri pariwisata di sektor bertahan di situasi pandemi dan PTKM. "Saat ini kita tidak bisa berbuat banyak selain mengharapkan lagi solusi relaksasi, intensif dari pemerintah hanya sekedar untuk bertahan saja. Reservasi hotel dan resto belum nampak (naik), ini yang memukul kita, maka relaksasi yang kami butuhkan adalah relaksasi dari pemerintah agar kami bisa *survive*," katanya.

Relaksasi yang dimaksud bisa berupa stimulus bagi pelaku industri wisata atau relaksasi pajak. Deddy menyebut, dari data terakhir reservasi hotel di DIY hanya mencapai 10 persen dari kapasitas yang disediakan. "Hotel dan resto yang masih beroperasi dengan tersengkal-sengkal karena saat ini okupansi hanya 5-10 persen rata-rata," jelasnya.

Kepala Dinas Pariwisata DIY,

Singgih Raharjo mengatakan sebelumnya bahwa saat ini belum ada rencana terkait adanya kebijakan relaksasi baik stimulus maupun insentif bagi industri pariwisata. Walaupun begitu, dimungkinkan akan ada kebijakan terkait stimulus ini nantinya dalam rangka membantu industri pariwisata di DIY bertahan di masa pandemi.

Terlebih, sebagian besar perekonomian di DIY digantungkan pada pariwisata. Sementara, sejak pandemi Covid-19 pertumbuhan perekonomian terus turun. "Saya yakin karena pandemi masih ada, baik nanti pemerintah pusat ada skema-skema untuk menyelamatkan industri pariwisata itu sendiri," kata Singgih.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DIY, Nur Cholis Suharnan meminta Pemerintah Daerah (Pemda) DIY untuk menjadikan hotel sebagai rumah sakit (RS) penangan Covid-19. Sebab, saat ini DIY masih kekurangan ruang isolasi Covid-19 karena kasus positif masih terus meningkat.

"Pemerintah harus berpikir bahwa kita kekurangan terkait ruang rumah sakit. Sehingga pemerintah harus menginventarisasi hotel-hotel yang dijual yang representatif untuk rumah sakit mana saja," katanya.

■ Eddy Hernan rahadi

Instansi	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Yogyakarta,
Kepala
Ttd

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005